

PERPUSTAKAAN SEBAGAI MEDIUM MORAL BUDAYA

Henny Surya Akbar Purna Putra
Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
E-mail: putra.akademisi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap perpustakaan sebagai medium moral budaya, melalui permasalahan-permasalahan yang muncul pada generasi muda yang berimplikasi pada moralitas bangsa. Berbagai permasalahan tersebut, dibahas secara mendalam dalam tiga bab, yaitu: budaya bangsa, moral, dan perpustakaan sebagai medium budaya bangsa. Tidak terlepas dari jenis penelitian pada artikel ini, penelitian ini dengan menggunakan metode *library reasearch* dengan beberapa langkah, seperti: pencarian, pengelompokkan, dan menginterpretasi data melalui sumber-sumber buku atau pun artikel-artikel ilmiah yang ditemukan oleh peneliti.

Kata Kunci: Perpustakaan, Moral, Budaya

A. PENDAHULUAN

Di era sekarang, informasi tidak terikat oleh ruang dan waktu, informasi dapat dengan mudah didapatkan dan disebarluaskan. Informasi-informasi di berbagai belahan dunia pun dapat kita dapatkan dengan cara yang praktis dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudahan-kemudahan tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang kian pesat. Informasi dari berbagai belahan dunia yang tidak terikat ruang dan waktu ini, memperluas peluang untuk saling bertukarnya budaya di berbagai belahan dunia. Pada posisi ini, negara-negara barat yang mempunyai peradaban maju menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk ikut serta mengadopsi gaya hidup negara maju.

Dewasa ini kita sering mendengar istilah *westernisasi*, istilah ini mengindikasikan bahwa pengaruh budaya barat sedikit-banyak telah diserap di berbagai negara lain yang salah satunya Indonesia. Media yang didominasi oleh informasi tentang negara barat lambat-laun akan memicu timbulnya *westernisasi* bagi generasi muda, sehingga semakin terkikisnya identitas asli budaya dalam negeri, seperti nilai-nilai agama, norma-norma sosial, dan moralitas. Fenomena terkikisnya identitas budaya ini tampak ketika berbagai media yang memberitakan tentang perilaku generasi muda yang anarkisme, tawuran, pelecehan seksual, dan premanisme. Fenomena ini menjadi masalah yang krusial bagi bangsa, generasi muda yang seharusnya menjadi kunci masa depan tetapi menyandang stigma negatif dimata masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai medium dalam membentuk moralitas generasi muda yang berakhlak mulia dan berbudi luhur melalui pembelajaran sepanjang hayat.

Perpustakaan mempunyai tugas mulia sebagai tempat

pembelajaran sepanjang hayat, artinya tidak ada batasan usia untuk belajar di perpustakaan. Dengan demikian, semua kalangan masyarakat mulai dari generasi muda hingga generasi tua berhak untuk belajar di perpustakaan guna menjadi masyarakat yang berkualitas. Permasalahan krisis moral pada generasi muda dewasa ini tidak dapat dijustifikasi seakan-akan generasi muda yang serba salah, di sisi lain peran orang tua sebagai kelompok primer mempunyai peranan penting dalam pembentukan moral anak. Sejalan dengan pandangan di atas, Burns (dalam Kiling, 2015:123) berpendapat bahwa praktek-praktek membesarkan anak yang menekankan penghargaan, kehangatan dan penerimaan dikaitkan dengan disiplin yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan harga diri anak yang berimplikasi pada konsep diri anak yang positif. Oleh karena itu, pembentukan moralitas generasi muda tidak dapat ditinjau dengan satu sisi saja, melainkan terdapat faktor-faktor eksternal lain yang tidak kalah penting sebagai pemicu pembentukan moral mereka.

Permasalahan generasi muda di atas sebenarnya memicu antara perpustakaan dan orang tua sebagai mitra, di sisi perpustakaan dengan menyediakan bahan pustaka dengan berbagai bidang keilmuan yang diperlukan orang tua dalam pembentukan konsep diri anak. Dewasa ini peran orang tua yang menganggap perpustakaan sebagai mitra dalam mendidik anak terbilang cukup rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kesadaran orang tua yang belum menganggap bahwa perpustakaan adalah salah satu media informasi yang kredibel, sehingga orang tua tidak perlu khawatir akan literatur-literatur yang disuguhkan di perpustakaan. Terlebih lagi diberbagai literatur yang disediakan di perpustakaan, banyak sekali literatur yang membahas tentang

moral, sehingga di samping literatur moral diperuntukkan kepada anak, tetapi dapat juga menjadi penambah wawasan bagi orang tua.

Hal ini semata-mata karena efek globalisasi yang kuat ditambah dengan peran teknologi informasi tanpa batas, merupakan indikator awal sebagai peleburan budaya. Yang mana dominasi budaya negara-negara maju sebagian besar akan mempengaruhi negara-negara berkembang. Untuk menyikapi hal tersebut peran perpustakaan sungguh fundamental, oleh karenanya perpustakaan hendaknya mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada orang tua sebagai medium moral budaya, karena dengan sosialisasi seperti ini dapat meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya peran perpustakaan sebagai medium moral budaya.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengungkap implikasi perpustakaan sebagai medium moral budaya dan bagaimana perpustakaan dapat memicu timbulnya minat baca. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode *library research*, yakni dengan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait bahasan dengan berbagai buku rujukan dan jurnal ilmiah.

B. PEMBAHASAN

1. Budaya Bangsa

Hingga saat ini budaya mempunyai pengertian yang luas, seperti halnya kajian budaya terkait dengan "*cultural studies*". *Cultural studies* itu sendiri memiliki pendekatan yang kompleks dalam melukiskan fenomena. Pendekatan yang kompleks ini memunculkan bervariasinya pandangan tentang makna "budaya", dalam semiotik budaya mempunyai makna

sebagai serangkaian kegiatan simbolis yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat, yakni dapat dipelajari, diajarkan, disalurkan pada anggota masyarakat, dan digunakan oleh kelompok masyarakat dalam situasi-situasi tertentu. Lotman (dalam Hasyim, 2016:5)

Istilah kebudayaan diambil dari *culture* yang sama artinya dengan kebudayaan. Jika ditelusuri kembali istilah *culture* sebenarnya diambil dari bahasa latin "*colere*" yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Koentjaraningrat (dalam Soekanto, 1982:188). Pendapat lain juga mengatakan kebudayaan adalah penciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani, terlingkup dalam membudayakan alam, memanusiation hidup, menyempurnakan hubungan keinsanian merupakan satu kesatuan. (Bakker, 1984:22).

Kebudayaan adalah kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diadabtasikan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Taylor (dalam Soekanto, 1982:189). Memetakan definisi kebudayaan secara tegas bukan perkara yang mudah bagi para ahli karena cakupan kebudayaan yang luas. Oleh karena itu, Soekanto mengambil jalan tengah bahwa kebudayaan berasal dari kata "*buddayah*" bentuk jamak dari "*budhi*" dalam bahasa sansekerta. Kata budi mempunyai arti hati, perasaan, mata batin, dll. (Soekanto, 1982:188).

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, kebudayaan bukan perkara yang mudah dalam mengangkat arti yang mudah dimengerti, oleh karena itu Soekanto mengambil

istilah dari terminologi bahasa sansekerta "buddi" yang artinya "hati". Unsur akal tersebut menjadi *clue* untuk menelusuri arti pasti tentang kebudayaan, ditambah perspektif semiotik bahwa kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang simbolis. Kegiatan simbolis ini dapat berupa kata, tindakan, atau pun benda. Oleh karena itu, didapatkan titik terang bahwa sebenarnya kebudayaan adalah serangkaian kegiatan simbolis untuk mencipta terkait penggunaan perasaan yang berbudi luhur, kegiatan simbolis itu dilakukan, dipelajari dan digunakan secara turun-menurun yang dengan tujuan untuk eksistensi identitas kelompok sosial.

Aspek-aspek kebudayaan yang begitu luas hingga menyentuh di setiap sisi terkecil manusia ini menyebabkan timbulnya norma-norma dan norma-norma tersebut bersifat mengatur baik-buruk tingkahlaku manusia atau dapat disebut dengan moral

2. Moral

Moral menjadi perbincangan yang hangat dewasa ini, sebab moral ini mempunyai keterkaitan erat oleh perilaku manusia. Kecenderungan yang mempunyai pengetahuan tentang moral, maka seseorang tersebut akan mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Sinulingga, 2016: 216).

Selama ini generasi muda mempunyai stigma amoral (tidak bermoral), karena fenomena yang eksis dari anak-anak sekolah adalah tawuran, perkelahian, membolos, dan lain-lain. Di sisi lain, moral ini terbentuk dari budayanya sendiri. Anak akan lebih bermoral ketika ia telah mampu menilai situasi

yang didahului oleh kemampuannya berperilaku sesuai dengan standar masyarakat atau kelompoknya, demikian juga anak akan lebih rasional ketika ia berperilaku berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Dewey (dalam Sinulingga, 2016: 224).

Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia, baik-buruk ini dilihat dari segi kemanusiaan, dan yang menjadi ukuran baik-buruk ini adalah norma-norma tentang moral, Suseno (dalam Sinulingga, 2016: 230). Pendapat lain meninjau secara terminologi tentang istilah moral, istilah tersebut berasal dari bahasa latin yaitu '*mores*' yang berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. Moral juga berkaitan dengan norma-norma yang membedakan antara tindakan benar atau pun salah. Budiningsih (dalam Mukino, dkk., 2016: 35).

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa moral adalah keseluruhan tindakan baik-buruk seseorang di lingkungannya dan tindakan baik-buruk tersebut telah terangkum dalam bentuk norma-norma sosial. Dalam pandangan Durkheim, bahwa terdapat tiga unsur agar moral dapat terwujud dengan sempurna, yakni: semangat disiplin, ikatan pada kelompok sosial, dan penentuan nasibnya sendiri, berikut penjelasannya.

- a. Semangat disiplin, dalam pandangan Durkheim telah dijelaskan bahwa moral dapat terbentuk dengan semangat disiplin. Moral yang mengandung berbagai aturan-aturan tertentu dalam mengatur tingkah-laku seseorang akan terasa sulit jika tanpa didasari oleh kesadaran akan
-

aturan-aturan tersebut, karena pada dasarnya manusia ingin bebas. Pada fase disiplin moral ini sebenarnya adalah tahap pengendalian diri, yakni menekan keinginan-keinginan tertentu dan melunakkan hasrat-hasrat tertentu agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga tindakan kedisiplinan di atas jika dilakukan secara terus-menerus akan memicu timbulnya watak dan kepribadian seseorang.

- b. Ikatan kelompok sosial, manusia adalah produk masyarakat, dari masyarakat itu pula generasi selalu turun-menurun. Manusia dapat merasa lengkap jika tergabung dalam masyarakat, sehingga moral dapat terbentuk melalui kelompok-kelompok sosial tersebut. Hal ini menjadi kedilemaan tersendiri ketika individu dihadapkan dengan proses perkembangan dirinya dengan kelompok sosial di lingkungannya. Individu membutuhkan kelompok sosial yang berguna dalam perkembangan dirinya melalui interaksi sosial di dalam kelompok sosial tersebut, sehingga dalam interaksi sosial tersebut individu akan berbagi pengalaman dan membentuk makna-makna baru dengan tujuan agar dirinya berkembang. Di lain sisi kelompok sosial tersebut mempunyai norma-norma yang bersifat mengikat, sedangkan individu tidak hanya tergabung dalam satu kelompok sosial saja melainkan lebih dari satu, seperti kelompok sosial keluarga, keagamaan, sekolah, teman bermain, dll. Kelompok sosial
-

yang begitu banyak mempunyai norma-norma yang tidak terhitung banyaknya, norma yang esensinya mengatur perilaku seseorang. Dalam perspektif tersebut, individu akan merasa terdokrin akan norma-norma tersebut yang tidak sesuai dengan prinsipnya. Dalam perspektif ini, individu tersebut akan mempunyai kecenderungan untuk melepaskan diri dengan kelompok-kelompok sosial yang mempunyai norma yang berbeda dengan prinsip dirinya.

- c. Penentuan nasibnya sendiri, kunci moral sebenarnya ada di dalam diri individu. Individu memegang kendali penuh akan semua perilakunya, oleh sebab penentuan arah perilaku individu berada dalam diri individu itu sendiri. Durkheim berpandangan bahwa unsur ketiga ini berkaitan erat dengan 'pengetahuan akan moralitas itu sendiri'. Dalam pandangannya juga, moralitas tidak lain hanyalah apa yang kita inginkan dan kita hanya mampu menaklukkan dunia moral dengan cara yang sama sebagaimana kita menaklukkan dunia fisik: yaitu dengan membangun ilmu pengetahuan di bidang moral. Durkheim (dalam Sinulingga, 2016: 233-265).

3. Perpustakaan sebagai Medium Moral Budaya

Abad teknologi dan informasi seperti sekarang telah menarik perpustakaan untuk selangkah lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya perkembangan teknologi dan informasi melesat sebegitu cepat hingga pada akhirnya perpustakaan selalu berada dibelakang perkembangan teknologi dan

informasi. Akan tetapi, perkembangan perpustakaan khususnya di Indonesia terbilang cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dari peran pemerintah yang turut-serta mendukung akan keberadaan perpustakaan dengan meresmikan regulasi-regulasi tentang perpustakaan secara resmi. Regulasi ini diimplementasikan ke dalam Undang-Undang tentang perpustakaan dan juga dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP).

Selama ini definisi, tugas, dan fungsi telah tertera di UU dan SNP di atas menjadi daya tarik bagi kalangan civitas akademika dalam mengkritisi UU dan SNP di atas. Dewasa ini hakikat perpustakaan dalam pandangan UU dan para ahli pun tidak jauh berbeda, ini menandakan bahwa hakikat perpustakaan dalam pandangan UU selama ini masih berguna secara kontekstual. Perpustakaan mempunyai pengertian sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. (UU No. 43 Tahun 2007). Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Sulisyo-Basuki (dalam Putra, 2018: 86), istilah perpustakaan sebenarnya di ambil dari kata '*libri*' yang artinya 'pustaka atau kitab' selanjutnya Sulistyoy-Basuki merepresentasikan bahwa perpustakaan adalah ruangan dalam gedung yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya, disusun menurut tata susuan tertentu, dan tidak untuk dijual. Pengertian yang lebih kontekstual yang diberikan oleh Sulistyoy-Basuki tentang perpustakaan.

Dari kedua pandangan di atas sebenarnya pengertian

tentang perpustakaan dapat diinterpretasikan sebagai mediator penghimpun produk budaya secara tulis, cetak, atau pun rekam guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi (P3IR) yang disusun berdasarkan tata aturan tertentu. Interpretasi akan perpustakaan di atas memunculkan kata kunci 'penghimpun', kebutuhan, dan 'tata aturan', ketiga kata kunci di atas mempunyai implikasi dengan tugas sebagai perpustakaan. Masih terkait dengan UU dan SNP, telah tertera bahwa tugas perpustakaan terbagi atas jenis perpustakaan. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis perpustakaan beserta tugasnya. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007 (dalam UU No. 43 Tahun 2007:5) menyebutkan bahwa terdapat lima jenis perpustakaan, sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Nasional, adalah perpustakaan Nasional yang menaungi hal-hal terkait dengan kebijakan perpustakaan dalam lingkup Nasional yang ditempatkan di lingkungan Ibukota negara. Beberapa cakupan tugas perpustakaan Nasional , meliputi:
 - 1). menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan
 - 2). melaksanakan pembinaan pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan
 - 3). membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan
 - 4). mengembangkan standar nasional
-

- perpustakaan
- 5). mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat
 - 6). mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa
 - 7). melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat
 - 8). mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.
- b. Perpustakaan Umum, diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. Berikut tugas perpustakaan umum:
- 1). mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing
 - 2). mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 - 3). memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat
 - 4). melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau perpustakaan menetap
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah, menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi SNP dengan mengadopsi Standar Nasional
-

Pendidikan. Berikut tugas perpustakaan sekolah:

- 1). menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk semua peserta didik dan pendidik
 - 2). mengembangkan koleksi lain yang mendukung kurikulum pendidikan
 - 3). melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan
 - 4). mengembangkan layanan berbasis TIK
 - 5). mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional atau anggaran belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi, menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi SNP dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan. Berikut tugas perpustakaan perguruan tinggi.:
- 1). menyediakan koleksi yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - 2). mengembangkan layanan perpustakaan berbasis TIK
 - 3). mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan SNP dan Standar Nasional Pendidikan
- e. Perpustakaan Khusus, menyediakan bahan koleksi sesuai dengan kebutuhan pemustaka di
-

lingkungannya. Berikut tugas perpustakaan khusus:

- 1). menyediakan bahan koleksi sesuai dengan pemustaka di lingkungannya dan keterbatasan koleksi di luar pemustaka di lingkungannya
- 2). perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan SNP
- 3). pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan pengembangan kepada perpustakaan khusus

Berdasarkan UU di atas, dapat diansumsikan bahwa hanya perpustakaan Nasional dan perpustakaan Umum yang memberikan kepedulian perpustakaan akan budaya. Di ranah perpustakaan Nasional, dapat ditemukan pada poin 6,7,8 yang menunjukkan kepedulian perpustakaan Nasional dalam membentuk dan melestarikan budaya. Pada ranah Perpustakaan Umum ditemukan pada poin 1,3,4,5 yang menunjukkan kepedulian perpustakaan tentang budaya. Poin-poin dalam menunjukkan kepedulian perpustakaan akan budaya, akan tetapi poin-poin tersebut belum menunjukkan perpustakaan sebagai refleksi moral budaya. Oleh karena itu sungguh ironi ketika hanya dua jenis perpustakaan yang memberikan kepedulian masyarakat akan budayanya sendiri, sedangkan tiga jenis perpustakaan di atas tidak memiliki tugas dan fungsi untuk ranah itu.

Berdasarkan UU di atas juga, dapat diansumsikan bahwa tujuan utama perpustakaan adalah untuk menghimpun dan memberantas buta huruf. Belum terlihat peran perpustakaan sebagai medium moral budaya, yakni dengan cara mengkonsep perpustakaan dengan nuansa budaya, memberikan promosi

tentang moral budaya bangsa, dan memberikan promosi koleksi mengenai jati diri budaya bangsa. Promosi ini juga dapat menjadi salah satu yang menunjukkan perpustakaan turut mendukung program pembentukan moral budaya selain tugas sekolah dalam membentuk moral generasi muda.

Selama ini permasalahan moral budaya sebenarnya tidak dapat di pandang sebelah mata dan menjustifikasi generasi muda yang menanggung sepenuhnya stigma amoral tersebut. Beranjak dari pendapat Jones (dalam Budyatna & Ganiem, 2014:87), bahwa orang yang berperilaku menyimpang itu berusaha keras untuk menarik perhatian atau berharap untuk mendapatkan pengakuan sebagai individu. Ini berarti ketika generasi muda melakukan penyimpangan itu sebenarnya hanya untuk menarik perhatian dan pengakuan masyarakat. Akan tetapi, dalam implementasi menarik perhatian dan pengakuan itu menggunakan cara yang salah sehingga menimbulkan stigma amoral di generasi muda.

Dibalik itu, peran kelompok sosial primer atau kelompok sosial lain pun sebenarnya mempunyai implikasi dalam pembentukan moral budaya generasi muda. Ironinya, peran kelompok-kelompok sosial tersebut tidak diungkap di berbagai media, padahal kelompok-kelompok itu menjadi kunci pembentukan moral budaya generasi muda. Kembali pada fungsi perpustakaan sebagai pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*), posisional ini perpustakaan bukan hanya memberikan pelayanan dan fasilitas untuk generasi muda atau pun kelompok sosial tertentu. Perpustakaan juga lebih menitik beratkan pada generasi-generasi tua sebagai pemegang kunci keberhasilan perpustakaan sebagai medium moral budaya. Oleh karena itu, tugas yang begitu fundamental hendaknya mempunyai konsep-konsep agar memaksimalkan

fungsi perpustakaan sebagai medium moral budaya. Berikut adalah konsep-konsep perpustakaan sebagai medium moral budaya:

a. Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Kebijakan berperan penting dalam pengembangan koleksi perpustakaan, UU No. 14 Tahun 2012 pasal 2 tentang kebijakan (dalam Perpustakaan Nasional, 2012:v). Kebijakan pengembangan berguna sebagai acuan, perpustakaan untuk memfokuskan kriteria-kriteria bahan koleksi yang hendak di kembangkan oleh perpustakaan. Hal ini akan menjadi keterkaitan antara kebijakan pengembangan dengan perpustakaan sebagai medium moral budaya. Berikut penjelasan kebijakan pengembangan koleksi di setiap perpustakaan.

Tabel 1. Jenis Perpustakaan dan Kebijakan Koleksi

No	Jenis Perpustakaan	Kebijakan Pengembangan Koleksi
1.	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Monograf • Terbitan Berkala • Manusrip • Kartografi • Rekaman Suara dan Video • Bahan Grafis • Bentuk Mikro • Pengarsipan Web • Sumber Elektronik • Sejarah Lisan • Bahan Ephemeral

2.	Umum	<p>Berdasarkan data jumlah koleksi perpustakaan Umum Daerah kota Tangerang Amaliah, (2011:30).</p> <ul style="list-style-type: none">• 000, Karya Umum = 2.884• 100, Filsafat = 2.759• 200, Agama = 7.964• 300, Ilmu sosial = 6.423• 400, Bahasa = 2.392• 500, Ilmu Murni = 3.127• 600, Ilmu Terapan = 6.662• 700, Seni & olahraga = 2.651• 800, Sastra = 2.958• 900, Sejarah, Geografi = 2.142• Fiksi Anak = 1.092• Fiksi Dewasa = 2.682
----	------	--

3.	Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, cetak, rekam atas fiksi dan nonfiksi• Koleksi nonfiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan penelitian dan literatur kelabu• Jumlah buku wajib dihitung menggunakan rumus $1 \text{ program studi} \times (144 \text{ sks dibagi } 2 \text{ sks per mata kuliah}) \times 2 \text{ Judul per mata kuliah} = 144 \text{ judul buku wajib per program studi.}$• Judul buu pengembangan = $2 \times \text{jumlah buku wajib}$• Koleksi AV (judul) = 2% dari total jumlah judul koleksi non AV• Jurnal ilmiah minimal 1 judul per program studi• Majalah ilmiah populer minimal 1 judul per program studi• Muatan lokal yang terdiri dari hasil karya ilmiah civitas akademika (skripsi,, tesis, disertasi, makalah seminar simposium, dll) yang di publikasi di media massa, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus.
----	------------------	---

4.	Sekolah	<p>Jenis koleksi perpustakaan meliputi berdasarkan SNP-007 (2011:2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, buku referensi dan buku biografi) • Terbitan berkala (majalah dan surat kabar) • Audio visual • Multimedia, <p>Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpustakaan wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik • Mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan
----	---------	--

Berdasarkan data di atas, perpustakaan Nasional dan perpustakaan Umum yang mendominasi dalam kebijakan pengembangan koleksi tentang kebudayaan dan agama. Pada posisional perpustakaan Nasional sebagai penghimpun dan pelestari budaya bangsa, sehingga karya-karya cetak, rekam, mau pun audio visual yang memiliki nilai kebudayaan bangsa akan dilestarikan oleh perpustakaan Nasional.

Sedangkan perpustakaan Umum didasarkan atas pengembangan koleksi di atas, notasi 200 tentang agama dan 300 tentang ilmu sosial yang paling dominan di antara notasi-notasi lain. Pada taraf ini dapat diansumsikan koleksi agama, dan ilmu sosial yang di dalamnya termasuk nilai-nilai agama dan kebudayaan mendominasi di perpustakaan umum. Selaras dengan tugas

perpustakaan Umum sebagai pendukung kebudayaan bertaraf kota.

Akan tetapi, berbeda dengan perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan sekolah. Perbedaan ini tampak ketika kedua jenis perpustakaan ini tidak mempunyai kebijakan koleksi berdominasi agama dan ilmu sosial. Hal ini akan mengurangi nilai perpustakaan sebagai medium moral budaya karena hendaknya perpustakaan dapat sebagai penyalur informasi akan moral budaya. Sedangkan generasi muda saat ini membutuhkan perhatian khusus agar tumbuh konsep diri yang berbudi luhur.

b. Menimbang Ruang Menata *Furniture* Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat publik diharapkan menimbang ruang perpustakaan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pemustaka. Kenyamanan ini berguna membantu meningkatkan daya konsentrasi pemustaka saat sedang membaca, sedangkan keamanan dapat meningkatkan rasa aman pemustaka dan meminimalisir praktik *vandalisme*. Sejalan dengan pandangan di atas, Cohen dan Cohen (dalam Ugwuanyi, dkk., 2011:93) berpendapat bahwa aspek desain interior seperti *furniture*, tata letak, alur kerja, aktivitas pemustaka, pencahayaan, dan warna merupakan hal yang perlu diperhatikan.

Kondisi seperti ini dibutuhkan evaluasi secara berkesinambungan agar tingkat indikator-indikator kelemahan dapat diminimalisir. Peran pustakawan dalam posisi ini sebagai peneliti untuk melukiskan kondisi psikis pemustaka ketika sedang di perpustakaan dan membangun jaringan dengan lintas profesi agar lebih mengoptimalkan konsep tata kelola ruang dan *furniture* perpustakaan. Yunliang

(dalam Ugwuanyi, dkk., 2011:93) menawarkan tiga konsep untuk menimbang ruang menata *furniture* di perpustakaan, antara lain: multifungsi, fleksibilitas, artistik.

- 1). Multifungsi, pertimbangan ini berhubungan dengan *space* bangunan yang berguna untuk menghimpun berbagai koleksi bahan pustaka. Karena bahan koleksi tercetak yang kian lama kian banyak, maka perlunya siasat agar kapasitas bangunan tetap ideal. Siasat ini dengan mengalih mediakan bahan-bahan tercetak menjadi digital. Selain itu, perlu adanya *space* untuk ruang diskusi, belajar, layanan internet, dll. yang telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kapasitas pemustaka
 - 2). Fleksibilitas, pertimbangan ini berhubungan dengan tingkat fleksibilitas bangunan, artinya desain bangunan yang telah didirikan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan desain ruangan dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan.
 - 3). Artistik, pertimbangan ini berhubungan dengan kenyamanan pemustaka. Desain bangunan yang terlihat kaku dan jadul akan berdampak pada pandangan negatif, sehingga menimbulkan rasa bosan bagi pemustaka atau pun pustakawan. Sebaliknya, ketika desain arsitektur dan furniture yang unik akan menimbulkan ketertarikan dan menambah rasa nyaman bagi pemustaka atau pun pustakawan.
-

c. Peran Perpustakaan dalam Memicu Minat Baca

Kedua pemaparan di atas telah menjelaskan tentang kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan dan menimbang ruang dan *furniture* perpustakaan sebagai fondasi perpustakaan. Sedangkan konsep ketiga ini cenderung lebih pada permasalahan kondisi psikologis perilaku pemustaka tentang pemenuhan kebutuhan informasi.

Kebutuhan informasi (*information needs*) ini sebenarnya muncul dari mulai berkembangnya teknologi. Namun, para ilmuwan terdahulu lebih tertarik mengkaji sistem dan teknologi informasi. Akan tetapi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kajian tentang informasi ini sedikit bergeser ke arah perilaku pengguna informasi. Pergeseran kajian ini menyebabkan ilmu-ilmu sosial *trend* dalam melukiskan fenomena perilaku informasi. Dan ini adalah tantangan baru untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan yang berguna sebagai praksis mau pun praktis di dunia perpustakaan

Berangkat dari pemahaman Wilson (dalam putubuku, 2008) menjabarkan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi untuk merubah kebutuhan informasi menjadi aktivitas pencari informasi, sebagai berikut:

- 1). Kondisi psikologis seseorang, keadaan emosi dapat mempengaruhi seseorang untuk mencari informasi. Ketika seseorang mempunyai emosi yang positif, maka aktivitas yang dilakukan dalam mencari informasi tersebut dilakukan dengan gembira. Sebaliknya, ketika seseorang sedang mengalami *bad mood*. Alhasil orang tersebut mencari informasi dengan perilaku
-

yang negatif hingga memicu tindakan *vandalisme*.

- 2). Demografis, ini berkaitan dengan keadaan sosial dan budaya. Yang mencolok dari faktor demografis ini tampak pada wilayah kota dan desa. Wilayah kota mempunyai kecenderungan kebutuhan informasi yang tinggi dikarenakan gaya hidup yang tak terlepas dengan media. Sebaliknya, wilayah desa mempunyai kecenderungan yang rendah terhadap informasi, disebabkan oleh keterbatasan media atau pun teknologi yang dapat menjangkau wilayah desa.
 - 3). Peran seseorang di masyarakatnya, ini berkaitan antara profesi dan hubungan interpersonal. Semisal peran sebagai pengajaran akan memenuhi kebutuhan informasinya sebagai pengajar dengan cara mengumpulkan materi-materi dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidangnya. Berbeda dengan peserta didik, yang memenuhi kebutuhan informasinya dalam taraf belajar untuk memahami materi dari pengajar.
 - 4). Lingkungan, ini berkaitan dengan dunia interaksi sosial aktor, seperti: diskusi, sekedar mengobrol, atau sekedar bertanya. Kondisi seperti ini menimbulkan kebutuhan informasi untuk saling memberikan *feedback* kepada aktor lain.
-

- 5). Karakteristik sumber informasi, ini berkaitan dengan informasi sebagai simbol pengguna informasi. Informasi-informasi tentang naik-turunnya saham mempunyai simbol, bahwa konsumsi informasi-informasi tersebut identik dengan orang-orang yang memakai jas, bekerja di perusahaan, atau mempunyai status sosial yang tinggi.

Faktor-faktor di atas dapat menjadi bahan pertimbangan perpustakaan dalam menjalin pendekatan kepada semua lapisan masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai medium untuk turut serta membangun moral yang berbudi luhur bagi generasi muda. Peran yang fundamental perpustakaan dapat melalui kebijakan yang lebih *general* untuk memperkaya koleksi tentang moral dan budaya asli. Selain itu, peran arsitektur dan konsep yang memicu minat baca generasi muda atau pun orang tua juga tidak dapat terlepas oleh tugas perpustakaan. Dengan demikian, peranan pustakawan menjadi kunci keberhasilan perpustakaan, agar perpustakaan dapat turut serta membangun moral budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Killing, N. B. & Indra Y K. (2015). Tinjauan Konsep Diri dan Dimensinya pada Anak dalam Masa Kanak-Kanak Akhir.
-

-
- Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling*, Vol 1, No. 2, 116-124.
- Mukino, dkk. (2016). Penerapan Model Reasonic Untuk Membentuk Moralitas Dan Karakter Siswa Pada PKN. *Jurnal Studi Sosial*, Vol. 4 No. 1, 42-52.
- Nurjannah. (2017). Eksistensi perpustakaan dalam Melestarikan Khazanah Budaya Bangsa. *Jurnal LIBRIA*, Vol. 9, No. 2, (D), 147-172.
- Putra, H.S.A.P. (2018). Simbolisme Kepemimpinan Transformasional dalam Optimalisasi Diri Pustakawan. *Jurnal Al-Kuttab*, Vol. 5, 85-100.
- Sinulingga. (2016). Setia Paulina. Teori Pendidikan Moral menurut Emile Durkheim Relevansinya bagi Pendidikan Moral Anak Indonesia. *Jurnal Filsafat*, Vol. 26 No. 2.
- Ugwuanyi, C. F, dkk. (2016). Library Space And Place: Nature, Use And Impact On Academic Library. *International Journal of Library and Information Science*, Vol. 3 (5), pp. 92-97.

Buku

- Amaliah. 2011. *Upaya Pengembangan Koleksi Pada Perpustakaan Umum Daerah Kota Tangerang* (Skripsi). Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Press.
- Bakker, 1984. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kanisius.
- Budyatna, Muhammad & Ganiem, Lila Mona. 2014. *Teori Komunikasi Antarpribadi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasyim, Muhammad. 2016. *Buku Ajar Mata Kuliah Kajian Budaya dan Media*. (Hasanuddin Press).
- Perpustakaan Nasional, 2012. *Kebijakan Pengembangan Koleksi*
-

- Perpustakaan Nasional*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Venus, Antar. 2015. *Filsafat Komunikasi Orang Melayu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Online

- _____. *UU Nomor 14 Tahun 2007*. Diakses pada: 9 Agustus 2018, di: <http://www.pnri.go.id/law-detail.php?lang=id&id=1709201143221r9g6HhRuc>
- Putubuku, 2008. *Perilaku Informasi, Semesta Pengetahuan*. Diakses pada: 9 Agustus 2018, di: <https://iperpin.wordpress.com/tag/td-wilson/>
-